



**PERENCANAAN DAN MANAJEMEN STRATEJIK  
CHAPTER 1-7**

**Dr. Maya Puspita Dewi, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2021**

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is light gray and covers the entire page.

# CHAPTER 1

## **Uraian dan Contoh**

### **Definisi dan Lingkup Perencanaan dan Manajemen Strategik Sektor Publik**

#### Sektor Publik

Pengertian Publik. Kata public (public) mengandung arti masyarakat atau rakyat pada umumnya dan pada khususnya seperti kelompok binaan, donator, konsituen, atau umat.

Privatisasi. Dewasa ini organisasi penyedia layanan sektor publik semakin banyak yang berpindah ke sektor swasta. Hal ini dikenal sebagai privatisasi.

Kepentingan Organisasi Publik. Organisasi publik memiliki kepentingan untuk mewujudkan kesehagteraan public.

Kepentingan Organisasi Swasta. Organisasi swasta umumnya memiliki kepentingan untk mencari laba/keuntungan yang sebesar besarnya

Contoh aktifitas sektor publik. Contoh umum berbagai aktifitas sektor publik, misalnya pemberiaan jaminan sosial, administrasi perencanaan kota, dan pengorganisasian pertahanan nasional

#### Bentuk Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik(kepemilikan publik) dapat berbentuk Perusahaan milik publik (dalam beberapa konteks termasuk perusahaan manufaktur; BUMN) yang

memiliki kebebasan dan komersial yang lebih besar dan diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Keputusan produksi umumnya tidak diambil oleh pemerintah (meskipun tujuannya sendiri dapat ditetapkan oleh pemerintah)

### Definisi Strategi Sektor Publik

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yakni 'strategia' yang berarti taktik dalam peperangan.

Strategi digunakan sebagai kerangka atau rencana tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan kebijakan dan program organisasi.

Strategi dapat berupa pola aktifitas dan alokasi sumber daya yang didisain untuk mencapai tujuan, sehingga strategi merupakan pilihan tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya

### Definisi Perencanaan Strategik dan Manajemen Strategik Sektor Publik

Manajemen adalah serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

Aktifitas tersebut diurai dalam urutan spesifik antara lain: 1. Perencanaan, 2, Pengorganisasian, 3. Kepemimpinan, dan 4. Pengendalian. Ini dilandasi oleh

pemikiran klasik dari industriawan Prancis, Henri Fayol, ditahun 1916 ((Houthoofs, 1998).

Fungsi perencanaan meliputi langkah langkah perumusan visi misi dan tujuan-sasaran-target, pengembangan dari berbagai strategi utk mewujudkan tujuan tujuan tersebut serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan keseluruhan aktifitas yang diperlukan bagi pengembangan rencana rencana tersebut.

Manajemen stratejik adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan (Heene, 2002).

Artinya manajemen stratejik menjadi suatu kesatuan dari keseluruhan proses yang terintegrasi yg dapat dirumuskan dalam lima tugas utamanya (Thompson dan Strickland, 2003) yaitu:

- Mengembangkan misi dan visi stratejik
- Menetapkan tujuan dan sasaran
- Menciptakan suatu strateji mencapai sasaran
- Mengimplementasikan dan melaksanakan strateji
- Mengevaluasi startegi dan pengarahannya

#### Definsi Perencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik dan manajemen stratejik bukanlah merupakan hal yang bersinonim.

Perencanaan stratejik yang rasional adalah suatu visi manajemen yang bertumpu pada paradigma dari manajemen ilmiah. Perencanaan stratejik mengedepankan suatu visi yang sistematis, serba beraturan.

Poister 1999, mengungkapkan bahwa perencanaan stratejik

- Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan organisasi
- Merespon pertanyaan subyektif terkait organisasi yang kadangkala berbeturan
- Membentengi kekuatan eksternal thp organisasi
- Bersikap realistis secara politis dengan mempertimbangkan para stakeholder
- Tempat bersandar kokoh dari intervensi top manajemen, anggota parkemen ataupun manajemen operasional
- Berorientasi pada pengembangan rencana bagi implementasi strateji

Pengertian Perencanaan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi. Perencanaan pembangunan di gambarkan menjadi 3 tahapan, yaoitu perencanaan jangka pendek, perenvcanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang

Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan jangka waktu satu tahun. Rencana jangka pendek sendiri merupakan pendefinisian dari tujuan jangka pendek.

Rencana jangka menengah dan panjang . Rencana jangka menengah dan panjang adalah rencana dengan jangka waktu lima tahun dan lebih dari lima tahun untuk jangka panjang. Rencana jangka menengah dan panjang merupakan pendefinisian dari tujuan jangka menengah dan panjang.

### **Latihan**

1. Jelaskan definisi manajemen,
2. Apakah yang dimaksud dengan Manajemen Strategik
3. Jelaskan definsi dari perencanaan stratejik
4. Jelaskan gambaran umum perencanaan stratejik menurut Poister, 1999

## Kunci Jawaban

1. Manajemen adalah serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Aktifitas tersebut diurai dalam urutan spesifik antara lain: 1. Perencanaan, 2, Pengorganisasian, 3. Kepemimpinan, dan 4. Pengendalian
2. Manajemen stratejik adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan (Heene, 2002).
3. Perencanaan stratejik yang rasional adalah suatu visi manajemen yang bertumpu pada paradigma dari manajemen ilmiah. Perencanaan stratejik mengedepankan suatu visi yang sistematis, serba beraturan
4. Poister 1999, mengungkapkan bahwa perencanaan stratejik
  - Bertujuan untk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan organisasi
  - Merespon pertanyaan subyektif terkait organisasi yang kadangkala berbeturan
  - Membentengi kekuatan eksternal thp organisasi
  - Bersikap realistis secara politis dengan mempertimbangkan para stakeholder
  - Tempat bersandar kokoh dari intervensi top manajemen, anggota parlkemen ataupun manajemen operasional



- Berorientasi pada pengembangan rencana bagi implementasi strategi

#### Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat 2016
2. Public Policy Analysis: An Introduction, William N. Dunn, 5th edition, 2013
3. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmidt 2010
4. Jurnal, atau paper yang terkait dengan bahasan dari setiap modul

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, positioned above the text 'Universitas Esa Unggul'.

## **CHAPTER 2**

## **Uraian**

### **Sektor Publik**

Kadangkala ada tumpang tindih antara sector public dan sector swasta/privat dalam memproduksi atau menyediakan barang/jasa tertentu, misalnya pengelolaan sampah, pengelolaan air, perawatan kesehatan, jasa keamanan dan lain lain.

Menurut Tom Christensen, dkk (2009) organisasi public dan swasta pada dasarnya berbeda:

- a. Kepentingan public berbeda dengan kepentingan swasta/privat karena sector public harus memperhatikan sejumlah norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa pertimbangan seperti masalah demokrasi, nilai nilai konstitusi, dan kesejahteraan masyarakat yang diberikan lebih banyak kepada organisasi public dari pada organisasi swasta/privat.
- b. Para pimpinan organisasi public bertanggung jawab kepada warga negara dan para pemilihnya atau kepada kelompok kelompok tertentu
- c. Organisasi public memerlukan penekanan yang lebih besar pada keterbukaan , transparansi, persamaan perlakuan, imparialitas dan preditabilitas. Kemitraan sektor public dan swasta semakin berkembang sebagai suatu bentuk organisasi yang sangat berguna diberbagai bidang, misalnya dalam bantuan untuk pembangunan yang bersumber dari luar negeri/Official Development Assistance.

Pemahaman public lebih ditempatkan pada suatu wilayah diluar pemerintahan itu sendiri. Ruang lingkup organisasi public pada setiap sector seringkali tidak sama karena adanya perbedaan secara historis dan perkembangan suasana politik yang mengakibatkan masing masing area organisasi publik menjadi berbeda.

Dalam prakteknya organisasi sector public di Indonesia didefinisikan sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Indra Bastian 2010) antara lain:

- a. Organisasi pemerintah pusat
- b. Organisasi pemerintah daerah
- c. Organisasi partai politik
- d. Organisasi partai politik
- e. Organisasi LSM
- f. Organisasi yayasan
- g. Organisasi pendidikan, seperti sekola
- h. Organisasi kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesma
- i. Organisasi tempat peribadatan, seperti Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura

### **Karakteristik Organisasi Sektor Publik**

Setiap organisasi mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Dalam kaitan dengan karakteristik organisasi sector public ini Tom Christiensen (2010) menyatakan bahwa adanya wilayah abu abu yang cukup besar antara organisasi public dengan organisasi swasta.

Namun demikian organisasi public memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi swasta dalam demokrasi perwakilan. Hal ini ditunjukkan oleh:

- a. Organisasi public memiliki pimpinan yang dipilih oleh pemilihan umum
- b. Organisasi public berbeda dengan organisasi swasta/privat terkait keberadaannya sebagai organisasi multifungsi seperti terkait dengan arah politik, pengendalian, keterwakilan, dan partisipasi pihak-pihak tertentu yang semuanya ini tidak dimiliki oleh organisasi swasta.
- c. Sebagian besar organisasi public berbeda dengan organisasi swasta karena organisasi public tidak beroperasi di pasar bebas yang kompetitif.

Julian Pratt dkk (2007) mengemukakan beberapa karakteristik organisasi pelayanan public antara lain:

- a. Organisasi pelayanan public dijalankan tidak hanya dengan satu hirarki namun lebih dari satu hirarki.
- b. Hakikat organisasi pelayanan public adalah menyediakan pelayanan (jasa bukan barang-barang)
- c. Tujuan dari organisasi pelayanan public adalah melayani kepentingan umum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi manajemen sector publik berfokus pada aktivitas organisasi sector publik secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini memerlukan sejumlah strategi dalam perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, serta pelaksanaan program strategi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

### **Lingkup Manajemen Staretjik Sektor Publik**

J.Constable, dalam Ryszard Barnat, (2014) menjelaskan area utama/lingkup yang menjadi focus dalam strategi manajemen sector public:

- Proses manajemen sekror publik
- Manajemen keputusa
- Skala wakt
- Srstruktur organisas
- Kegiatan organisasi sector public

### **Bentuk organisasi Sektor Publik**

Organisasi sektor publik,(kepemilikan publik) dapat mengambil bentuk:

- Administrasi langsung yang didanai oleh pajak
- Perusahaan milik publik (dalam beberapa konteks termasuk perusahaan manufaktur; BUMN) yang memiliki kebebasan dan komersial yang lebih besar dan diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Keputusan produksi umumnya tidak diambil oleh pemerintah (meskipun tujuannya sendiri dapat ditetapkan oleh pemerintah)

Pengertian kelembagaan (institusi). B Aylward dan A. Fernandez Gonzalez (1998) menyatakan kelembagaan ( institusi) sebagai sekumpulan norma atau sejumlah aturan main yang efektif digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengorganisasikan sebuah lingkungan tertentu dari aktifitas kolektif mereka.

### **Jangka Waktu Perencanaan Strategik**

Pengertian Perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi

Rencana jangka pendek.

Rencana jangka pendek adalah rencana dengan jangka waktu satu tahun. Rencana jangka pendek sendiri merupakan pendefinisian dari tujuan jangka pendek.

Rencana jangka menengah dan panjang .

Rencana jangka menengah dan panjang adalah rencana dengan jangka waktu lima tahun dan lebih dari lima tahun untuk jangka panjang. Rencana jangka menengah dan panjang sendiri merupakan pendefinisian dari tujuan jangka menengah dan panjang.

### **Latihan**

1. Jelaskan contoh organisasi public di Indonesia?
2. Jelaskan karakteristik organisasi public menurut Julian Pratt (2007)?
3. Jelaskan lingkup/area strategi manajemen sektor public?

## Kunci Jawaban

1. Organisasi Publik di Indonesia antara lain:

- Organisasi pemerintah pusat
- Organisasi pemerintah daerah
- Organisasi partai politik
- Organisasi partai politik
- Organisasi LSM
- Organisasi yayasan
- Organisasi pendidikan, seperti sekolah
- Organisasi kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesmas
- Organisasi tempat peribadatan, seperti Masjid, gereja, Vihara, dan Pura

2. Julian Pratt dkk (2007) mengemukakan beberapa karakteristik organisasi pelayanan public antara lain

- Organisasi pelayanan public dijalankan tidak hanya dengan satu hirarki namun lebih dari satu hirarki.
- Hakikat organisasi pelayanan public adalah menyediakan pelayanan (jasa) bukan barang barang
- Tujuan dari organisasi pelayanan public adalah melayani kepentingan umum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan

3. Lingkup Manajemen Strategik Sektor Publik menurut J.Constable, dalam Ryszard Barnat, (2014) menjelaskan area utama/lingkup yang menjadi focus dalam strategi manajemen sector public:



- Proses manajemen sektor publik
- Manajemen keputusan
- Skala waktu
- Struktur organisasi
- Kegiatan organisasi sector public

### **Daftar Pustaka**

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Public Policy Analysis: An Introduction, William N. Dunn, 5th edition, 2013
3. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmidt 2010

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is light gray and covers the entire page.

# CHAPTER 3

## Uraian dan Contoh

### Tantangan Strategik

Beberapa tantangan strategik antara lain:

- The challenge of mandate.
- The challenge of efficiency.
- The challenge of competitiveness.
- The challenge of boundaries.
- The challenge of service.
- The challenge of public interest.

#### *The challenge of mandate*

Tantangan terkait mandate ini lebih didasarkan pada pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan segala tugas dan fungsinya

Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan al:

Does the organization serve special community or development purposes? Is the organization part of the rule-making process?

Does the organization principally produce public goods?

### *The Challenge of Efficiency*

Apakah efisiensi organisasi menggunakan standar industry? Misalnya Benchmarking, best practices, and comparative performance can give us a handle.

### *The Challenge of Competitiveness*

Tantangan berkompetisi didasarkan pertanyaan seperti apakah suatu organisasi dapat berkompetisi di pasar?

*The Postal Service, for example.*

### *The Challenge of Boundaries*

What is the territorial and organizational scope?

- All government agencies are define in part by their geographical and organizational boundaries.
- Many agencies are now challenging their boundaries.
- Technological expertise.
- Modern transportation and communication.
- The emergence of competition.

### *The Challenge of Service*

Is the organization effectively consumer oriented? Misalnya:

- The move toward customer service is a revolutionary change in government thinking.
- The Citizen's Charter in Great Britain.

- The Service First team has established six service standards for government
- Answer letters quickly and clearly.
- Provide clear information about services and at least one telephone number for inquiries.
- Consult users regularly about the service provided and report on the results.
- Provide at least one complaint procedure for services provided and send information about this procedure as requested.

### *The Challenge of Public Interest*

Does the organization clearly serve the public interest?

Designing services to meet the national interest as opposed to sectional, regional, staff, or staff interests is a major strategic challenge.

One useful technique is to prepare a list of an organization's community service obligations with identification of costs and beneficiaries.

### **Strategi sebagai penggerak Organisasi**

Konsep strategi (Mintzberg, 1987) sekurang kurangnya mencakup lima arti yang saling kait mengkait, yaitu:

1. Perencanaan dibuat untuk membuat smakin jelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional sehingga dapat mewujudkan tujuan tujuan jangka panjangnya
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku tindakan yang dilakukan oleh organisasi
3. Sudut atau posisi yang dipilih organisasi saat menjalankan aktifitasnya
4. Suatu perpektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisikan informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Saling keterkaitan antar ke lima butir arti strategi tsb lebih tergambar ketika di lapangan. Misalnya suatu strategi yang menghantarkan pada suatu pilihan yang sesuai dengan perspektif organisasi yang digunakan dalam rumusan perencanaan (Houthoofd, 2000).

### **Strategi yang direncanakan VS Strategi yang di laksanakan**

Terminologi yang dikembangkan **Mintzberg dan Waters** menyatakan bahwa strategi yang hendak diterapkan oleh organisasi biasanya akan selalu menyimpang dari dari strategi yang kemudian di laksanakan .

Strategi organisasi dapat di kaitkan penafsirannya dalam makna strategi sebagai suatu perencanaan. Dengan demikian organisasi perlu mengembangkan secara rasional serta berperilaku proaktif sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang

dikehendaknya. Namun adakalanya upaya untuk menerapkan strategi juga cenderung didasarkan pada penafsiran bahwa strategi sebagai sesuatu yang sudah terpolakan. Pemahaman demikian berarti bahwa pendefinisian strategi menjadi implementasi hanya terpaku pada pola perilaku yang konsisten sepanjang waktu dengan menjunjung tinggi rasionalitas (Heene, 2002,2003).

Mintzberg dan Waters menyatakan bahwa penyebab kesulitan dalam menerapkan rumusan strategi kedalam pelaksanaan di lapangan karena dua hal:

- a. Hampir selalu terjadi strategi yang telah dirumuskan dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan karena ada kendala implementasi.
- b. Formulasi strategi (Strategi yang rasional) hanya sebagian saja yang berhasil diimplementasikan karena ada tumpang tindih (pendomplengan) strategi lain yang muncul belakangan yang bersifat oportunistik dan dipaksakan.

### **Latihan**

1. Jelaskan tantangan tantangan strategi yang Saudara ketahui?
2. Menurut Mintzberg jelaskan 5 hal pokok terkait strategi yang saling kait mengkait?
3. Apa penyebab kesulitan menerapkan rumusan strategi menurut Mintzberg dan Waters?

## Kunci Jawaban

1. Beberapa tantangan strategik antara lain:
  - a. The challenge of mandate.
  - b. The challenge of efficiency.
  - c. The challenge of competitiveness.
  - d. The challenge of boundaries.
  - e. The challenge of service.
  - f. The challenge of public interest.
  
2. Konsep strategi (Mintzberg, 1987) sekurang kurangnya mencakup lima arti yang saling kait mengkait, yaitu:
  - Perencanaan untuk semakin jelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya
  - Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku/tindakan yang dilakukan oleh organisasi
  - Sudut atau posisi yang dipilih organisasi saat memunculkan aktifitasnya
  - Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya
  - Rincian langkah taktis organisasi yang berisikan informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan



3. Penyebab kesulitan dalam menerapkan rumusan strategi kedalam pelaksanaan di lapangan menurut Mintzberg dan Waters karena dua hal:

- Hampir selalu terjadi strategi yang telah dirumuskan dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan karena ada kendala implementasi.
- Formulasi strategi (Strategi yang rasional) hanya sebagian saja yang berhasil diimplementasikan karena ada tandingan (pendomplengan) strategi lain yang muncul belakangan yang bersifat oportunistik dan dipaksakan

#### **Daftar Pustaka**

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Public Policy Analysis: An Introduction, William N. Dunn, 5th edition, 2013
3. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmidt, 2010

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is semi-transparent and covers the entire page.

# CHAPTER 4

## **Uraian dan Contoh**

### **Perlunya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran**

Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses pemerintah antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaturan yang terpisah ini memunculkan masalah keterlelepaskaitan antara perencanaarr dan penganggaran.

Hasil telaah kelembagaan pentingnya sinergisme perencanaan dan penganggaran mendapatkan bahwa secara kelembagaan institusi perencanaan dan penganggaran terpisah dan saling mengisolasi. Bila dibandingkan dengan kelembagaan yang menangani perencanaan dan penganggaran di banyak negara di dunia, kelembagaan perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan terintegrasi. Kelembagaan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari presiden untuk- melakukan kegiatan alokasi anggaran pemerintah ke prioritas yang disusun oleh Presiden.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran juga harus dibangun kesiapan daerah dalam menyusun rencana. Untuk itu, indikasi dana transfer harus diinformasikan diawal sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi daerah untuk menyusun rencananya. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan bersama-sama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sehingga devisasi yang

disebutkan di atas semakin bisa diperkecil. Hal yang penting lainnya adalah pelaksanaan evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang didukung oleh sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Terhadap adanya kondisi keterlempasaan tersebut perlu disusun regulasi untuk menjembatani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional serta diperlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penjurusan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (monev follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Pendekatan penganggaran berbasis follow program/ melalui penganggaran melalui:

1. kerangka pendanaan;
2. kerangka regulasi; dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan berdasarkan tahapan

- a. Pen usunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan b. Tinjau ulang (reviu) angka dasar kementerian/lembaga;
- b. Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;
- c. Penyiapan rancangan awal RKP;
- d. Penyusunan pagu indikatif;
- e. Koordinasi penyusunan rancangan awal RKP;

- f. Penetapan rancangan awal RKp dan pagu indikatif kementerian/ lembaga;
- g. Penyusunan Renja K/L;
- h. Pembahasan rancangan RKIP, dan pokok-pokok kebijakan pendahuluan;
- i. Penetapan RKP dan pagu lembaga; dan kerangka ekonomi makro, fiskal dalam pembicaraan anggaran kementerian/
- j. Penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

### **Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan**

Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program tahun bedalan bersama Menteri Keuangan.

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKP tahun berjalan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan.

### **Pokok Pokok Penguatan Perencanaan dan Penganggaran**

Dalam penguatan perencanaan dan penganggaran seperti yang termuat dalam PP No. 17 tahun 2017 mencakup bebrapa hal antara lain:

- a. Pengendalian Prioritas
- b. Integrasi Pendanaan
- c. Penyusunan resource envelope
- d. Penyusunan pagu
- e. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)



Prinsip Sinkronisasi penyusunan peraturan pemerintah no. 17 tahun 2017 didasarkan pada payung hukum dua undang undang, yaitu UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



## PRINSIP SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN PP 17/2017



### Latihan

1. Jelaskan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
2. Jelaskan lima tahapan pertama proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
3. Jelaskan kementerian/lembaga apa saja yang melakukan pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan?



## Kunci Jawaban

1. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penJrusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan.
2. Lima tahapan pertama proses perencanaan dan penganggaraan
  - Penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan
  - Tinjau ulang (reviu) angka dasar kementerian/lembaga;
  - Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiscal serta ketersediaan anggaran;
  - Penyiapan rancangan awal RKP;
  - Penyusunan pagu indikati
3. Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

## Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat 2016
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional



**CHAPTER 5**

## Uraian dan Contoh

Johnson dan Scholes (2002) menginventarisasi pendekatan dalam manajemen stratejik dengan memilah beberapa tinjauannya antara lain:

- Perencanaan stratejik; merupakan bentuk awal dari pendekatan teknokratis dalam manajemen stratejik, setahap demi setahap dimana aspek kronologis dari manajemen stratejik lebih diutamakan. Dalam hal ini manajemen stratejik menjadi proses yg formalitis.
- Kepemimpinan stratejik; mengembalikan pertanggungjawaban manajemen stratejik dari suatu organisasi pada individu tertentu. Dalam hal ini pemimpin stratejik merupakan ujung tombak dari proses manajemen stratejik. Kepribadian dan/atau reputasi seorang pemimpin seakan menjadi motor penggerak strateji tsb.
- Manajemen stratejik yang dipolitisir. Ini menegaskan isu-isu pemikiran analitis dan rasional dari perencanaan stratejik. Manajemen stratejik merupakan sebuah proses yang terus menerus yang patuh kepada penguasa termasuk hasil negosiasinya dengan berbagai stake holder maupun kelompok kepentingan lainnya.
- Inkrementalisme yang realistic. Ini mengacu pada pencapaian tujuan objektif yang dilakukan setahap demi setahap.

## **Konsep Perencanaan Stratejik**

Perencanaan strategik yang rasional adalah suatu visi dari manajemen yang khusus bertumpu pada paradigma “manajemen ilmiah”. Beranjak dari visi top-down, secara berjenjang, tinjauan atas mazhab manajemen yang tradisional yang mengemukakan perlunya penanganan yang sistematis terhadap suatu strategi.

Para manajer akan melakukan kegiatan dengan serangkaian tahapan antara lain:

- Membangun sekumpulan tujuan tujuan
- Merancang rincian langkah yang proporsional untuk merealisasikan terwujudnya tujuan tujuan tersebut (Worral, 1998).

Mazhab perencanaan berpendirian bahwa sekelompok tim perencana dapat memprediksikan secara acak keadaan evolutif yang berkembang dalam lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi. Dalam praktiknya kadangkala perencanaan strategik didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang sepenuhnya linier, dimana keputusan keputusan terlebih dahulu di godok pada level tertinggi organisasi dan kemudian diturunkan berupa program program, anggaran serta akhirnya berujung pada aktifitas aktifitas (Houthoofd, 2000).

Ada anggapan bahwa perencanaan strategik dan manajemen strategik sebagai suatu yang sinonim atau bahkan konsep yang saling dipertukarkan. Hal ini bisa didasari anggapan bahwa :

1. Ada empat langkah dalam perencanaan strategik yaitu: (a). Materi penjelasan atau situasi lingkungan, (2)., Perumusan strategi, (3) Implementasi strategi, (4) Evaluasi strategi dan pengendaliannya (Houthoofd, 2000). Seandainya hanya terpaku pada struktur dari suatu proses manajemen, maka dimungkinkan sangat sulit membedakan antara perencanaan strategik dan manajemen strategik.
2. Ada nya hubungan yang kuat antara perencanaan strategik dan manajemen strategik. Vinzant (1996) menggambarkan pertanda keterkaitan itu secara tepat dengan ungkapan bahwa perencanaan strategik merupakan tulang punggung manajemen strategik.

Namun memang perlu digarisbawahi bahwa manajemen strategik seringkali diwarnai oleh perencanaan strategik (Vinzant, 1996).

Perencanaan strategik adalah suatu upaya procedural sistematis yang dapat mendukung proses dari manajemen strategik. Sedangkan manajemen strategik bukanlah merupakan hasil dari suatu perencanaan strategik, namun merupakan respon terhadap perumusan awal dari ruang lingkup manajemen dengan teknik teknik analisis untuk mengembangkan strategi dan mengimplementasikannya (Galloway, 2001). Selain itu bisa juga di sebutkan bahwa perencanaan strategik adalah suatu pemikiran analitis, sedangkan manajemen strategi sintesisnya (Mintzberg, 1994). Atau dengan kata lain manajemen strategik tidak ditujukan pada perumusan dari rencana rencana strategik, akan tetapi lebih tertuju pada pemberdayaan strategi suatu organisasi agar berkesinambungan.

Oleh karenanya bagi suatu organisasi publik, aktifitasnya tdk hanya sebatas dalam menyusun rencana stratejik saja akan tetapi berupa aktifitas organisasi dimana proses penganggaran, evaluasi kinerja, pengembangan SDM, pemrograman strategi bersama dengan seluruh proses manajemen lainnya yang dipandu melalui agenda yang terintegrasi. Proses tersebut dikembangkan melalui penyesuaian terhadap keseluruhan pelaku nya/stakeholders, dan disertai upaya untuk mengkomunikasikan di dalam organisai tersebut dan sesuai dengan keinginan semua pelaku pelaku eksternalnya (Poister, 1999).

### **Evolusi Perencanaan stratejik Menuju Manajemn stratejik**

Manajemen stratejik menekankan pentingnya penyesuaian suatu organisasi dengan melakukan penataan kompetensi manajemen yang spesifik. Penelitian yg dilakuakn MCKinsey (Gluck 1992) berargumentasi bahwa setiap organisasi yang berbasis strategi perlu melalui suatu tahapan partisipasi atau menfikuti suatu mazhab pemikiran tertentu sebelum ini menguasai kompetensi kompetensi untuk memulai serta mengendalikan proses prose strategi yang sebenarnya. Menurut Gluck (1992), bahwa setiap organisasi didalam proses evolusinya dari mulai perencanaan stratejik menuju ke suatu manjemen stratejik akan mengalami pertumbuhan dengan empat tahapan spesifik (Gluck, Houfman dan Walleck, 1982) antara lain:

1. Tahap Perencanaan Keuangan (perolehan anggaran):
  - Efektifitas proses keputusan stratejik
  - Anggaran tahunan

- Fungsional
2. Tahap II, Perencanaan Masa Depan (permasalahan masa depan)
    - Anggaran dua tahun atau lebih
    - Analisis Kesenjangan
    - Alokasi sarana secara statistic
  3. Tahap III, perencanaan external (pemikiran stratejik)
    - Pendekatan dan analisis situasi
    - Evaluasi pilihan starteji
    - Alokasi sarana bersifat dinamis
  4. Tahap IV, Perencanaan stratejik (pembentukan masa depan)
    - Kerangka pikir stratejik
    - Organisasi yg berfokus stratejik
    - Pengembangan kapasitas pemikiran stratjik
    - Penguatan proses manajemen koheren, timbal balik
    - Dukungan sistem nilai dan iklim kerja

### **Proses Perencanaan Staratejik**

Cohen dan Elmick (1998) merumuskan standar untuk perencanaan stratejik dan manajemen stratejik adalah analisis-perumusan-implementasi-evaluasi, maka dikembangkanlah suatu kronologis tahapan perencanaan yang terdiri atas tujuh tahapan. Tahap I sampai IV merangkum kegiatan kegiatan analisis, lalu tahapan V menyangkut perumusan, tahapan VI seputar implementasi dan sebagai penutup di tahapan VII terkait evaluasi.



Detil tahapan perencanaan stratejik menurut Cohen dan Elmicke (1998) antara lain:

1. Tahap I, berupa analisis permasalahan dan peluang, berisi
  - Penjabaran mis
  - Identifikasi hambatan dan peluang
2. Tahapan II, berupa identifikasi dan analisis terhadap para pelaku utama. Pelaku pelaku mana yang mendatangkan permasalahan, ancaman (hambatan), juga peluang (kesempatan) bagi organisasi public
3. Tahapan III, berupa analisis historis
4. Tahapan IV, berupa analisis organisasi dan situasinya. Kekuatan kelemahan organisasi, kekuatannya, kelemahannya, realisasinya, termasuk peluang dan ancamannya
5. Tahapan V, berupa perumusan strategi
6. Tahapan VI, berupa proyeksi dan ujicoba
7. Tahapan VII, berupa evaluasi dan pembinaan.

### **Latihan**

1. Jelaskan perencanaan stratejik dan kepemimpinan stratejik menurut Johnson dan Scholes (2002)
2. Jelaskan pengertian perencanaan stratejik yang rasional
3. Jelaskan 4 langkah perencanaan stratejik menurut Houthoofd, (2000).
4. Jelaskan Detil tahapan perencanaan stratejik menurut Cohen dan Elmicke (1998)

## Kunci Jawaban

1. Menurut Johnson dan Scholes (2002): Perencanaan stratejik; merupakan bentuk awal dari pendekatan teknokratis dalam manajemen stratejik, setahap demi setahap dimana aspek kronologis dari manajemen stratejik lebih diutamakan. Dalam hal ini manajemen stratejik menjadi proses yg formalitis.

Kepemimpinan stratejik; mengembalikan pertanggungjawaban manajemen stratejik dari suatu organisasi pada individu tertentu. Dalam hal ini pemimpin stratejik merupakan ujung tombak dari proses manajemen stratejik. Kepribadian dan/atau reputasi seorang pemimpin seakan menjadi motor penggerak strateji tsb.

2. Perencanaan stratejik yang rasional adalah suatu visi dari manajemen yang khusus bertumpu pada paradigma "manajemen ilmiah". Beranjak dari visi top-down, secara berjenjang, tinjauan atas mazhab manajemen yang tradisional yang mengemukakan perlunya penanganan yang sistematis terhadap suatu strateji.

3. Ada empat langkah dalam perencanaan stratejik ( Houthoofd, 2000) yaitu:

(a) Materi penjelasan atau situasi lingkungan,

(b) Perumusan strateji,

(c) Implementasi strateji,

(d) Evaluasi strateji dan pengendaliannya (Houthoofd, 2000).

4. Detil tahapan perencanaan stratejik menurut Cohen dan Elmicke (1998) antara lain:

Tahap I, berupa analisis permasalahan dan peluang, berisi

- Penjabaran misi
- Identifikasi hambatan dan peluang

Tahapan II, berupa identifikasi dan analisis terhadap para pelaku utama.

Pelaku pelaku mana yang mendatangkan permasalahan, ancaman (hambatan), juga peluang (kesempatan) bagi organisasi public

Tahapan III, berupa analisis historis

Tahapan IV, berupa analisis organisasi dan situasinya. Kekuatan kekuatan organisasi, kelemahannya, realisasinya, termasuk peluang dan ancamannya

Tahapan V, berupa perumusan strategi

Tahapan VI, berupa proyeksi dan ujicoba

Tahapan VII, berupa evaluasi dan pembinaan.

### **Daftar Pustaka**

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010

The background of the page features a repeating pattern of the Universitas Esa Unggul logo. Each logo consists of a stylized circular emblem with blue and orange curved lines, and the text 'Universitas Esa Unggul' below it. The watermark is semi-transparent and covers the entire page.

# CHAPTER 6

## **Uraian dan Contoh**

### **Teknik Penyusunan Regulasi strategi sektor publik**

Pada dasarnya kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat atau kepentingan publik harus diterbitkan baik ditingkat pemerintah pusat, daerah, dan satuan satuan seperti satuan kesehatan, satuan pendidikan dll.

Seperti diketahui bahwa regulasi strategi manajemen sector publik adalah gambaran kebijakan organisasi sector publik sebagai penyedia layanan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan dalam penyusunan regulasi strategi manajemen sector publik adalah:

- a) Perumusan Masalah
- b) Penyusunan Rancangan Regulasi Strategi manajemen Sector Publiik
- c) Pembahasan Regulasi
- d) Pengesahan regulasi

### **Perumusan Masalah**

Berikut pertanyaan yang terkait dengan perumusan masalah :

- Apakah masalah strategi manajemen sector publik yang akan diselesaikan?
- Sebutkan hal hal yang dibutuhkan dalam strategi Manajemen Sektor publik?
- Analisa keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi strategi manajemen sector public

- Sebutkan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah strategi manajemen sector publik tersebut?

Contoh permasalahan dalam strategi manajemen sector public

Tahapan siklus strategi sector publik	Permasalahan	Pihak terkait
Perencanaan strategi manajemen sector publik	Ketimpangan pelayanan kesejahteraan	Bagian perencanaan, bagian program, dan stakeholder lain
Perencanaan strategi manajemen sector publik	Alokasi anggaran yang blm sesuai dgn yang direncanakan	Bagian anggaran, bagian keuangan
Realisasi anggaran	Jadual dan jumlah dana yang di alokasikan belum sesuai dengan yang direncanakan	Bagian anggaran dan bagian keuangan

### Penyusunan Rancangan Strategi

Secara sederhana rancangan regulasi strategi manajemen sector publik harus dapat menjelaskan tentang siapa organisasi pelayanan kesejahteraan yang ikut serta, pihak pelaksana regulasi, kewenangan seperti apa yang diberikan kepadanya, perlu tidaknya pemisahan dari pihak pelaksanan regulasi dengan pihak yang menetapkan sangki atas ketidakpatuhan, persyaratan seperti apa yang mengikat organisasi penyedia layanan kesejahteraan serta sangksi seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada pihak pelaksana jika melakukan penyalagunaan wewenang.

Masih ditemukan regulasi regulasi yang penerapannya saling tumpang tindih dan belum/tidak bersinergi satu regulasi dengan regulasi lainnya maka dibutuhkan harmonisasi peraturan perundangan mutlak dilakukan apabila akan menyusun rancangan strategi yang baru.

Contohnya:

Rancangan UU Omnibus law Cipta Kerja pada prinsipnya ingin memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga pengangguran bisa di kurangi. RUU Cipta kerja ini mengharmonisasi bebrabagi peraturan perundangan undangn yang tumpang tindih dan tidak berinergi satu sama lainnya yang pada akhirnya malah bukan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi malah memperlambat dan menghalangi penciptaan lapangan kerja.

### **Pembahasan regulasi**

Tahapan penting dari pembahasan regulasi ada pada lingkup tim teknis pihak pelaksana (pemerintah/pihak eksekutif), lembaga legislative ( dewan penasehat, dewan penyantun dll) serta masyarakat.

Pembahasan pada tim telknis pelaksanaan adalah pembahasan yang lebih memrepresentaiskan kepentingan pelaksana (eksekutif) untk selanjutnya melakukan dengar pendapat Bersama masyarakat.

Dapat dilakukan melalui dengar pendapat (public hearing). Public hearing adalah salah satu cara untuk memperoleh aspirasi, masukan dan informasi dari warga.

Ddengan public hearing diharapkan keputusan atau kebijakan yang diambil benar benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

### **Pengesahan Regulasi**

Tahapan terakhir dalam penyusunan regulasi strategi sector publik adalah pengesahan regulasi yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan rancangan regulasi oleh pihak yang berwenang dalam bidang layanan kesejahteraan.

Secara hukum regulasi strategi manajemen sector public telah memiliki hukum materiil terhadap pihak yang menyetujuinya . Sejak penadatanganannya tersebut maka rumusan hukum yang ada dalam regualsi sektor public sudah tidak dapat diganti secara sepihak.

Contoh UU Sistem pendidikan Nasional dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tentunya mengatur kepada pihak pihak yang berkepdntingan terhadap layanan jaminan social masyarakat.

### **Latihan**

1. Jelaskan tahapan teknik penyusunan regulasi sector public
2. Jelaskan mengapa dala penencanaan regulasi membutuhkan harmonisasi terhadap aturan aturan lainnya?



## **Kunci Jawaban**

1. Tahapan dalam penyusunan regulasi strategi manajemen sector publik adalah:
  - a) Perumusan Masalah
  - b) Penyusunan Rancangan Regulasi Strategi manajemen Sector Publik
  - c) Pembahasan Regulasi
  - d) Pengesahan regulasi
2. Masih ditemukan regulasi regulasi yang penerapannya saling tumpang tindih dan belum/tidak bersinergi satu regulasi dengan regulasi lainnya maka dibutuhkan harmonisasi peraturan perundangan mutlak dilakukan apabila akan menyusun rancangan strategi yang baru.

## **Daftar Pustaka**

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010



**CHAPTER 7**

## **Uraian**

### **Ideologi Kesejahteraan**

Ideologi didefinisikan sebagai sebuah aturan yang terkait erat dengan ide dan keyakinan terhadap dunai dari sekelompok orang dengan menunjukkan Bahasa atau perilaku kesejumlah orang atau masyarakat.

Karl Mark (dalam Andrew Heywood, 1998) berpendapat bahwa ideologi tidaklah hanya berbicara mengenai keberadaan atau kenyataan empiris tetapi berbicara juga tentang kemanfaatan, kepentingan dan pamrih, bahkan ideologi juga bisa didefinisikan sebagai ilusi atau pandangan yang menyesatkan tentang dunai dan kepalsuan.

Pakas sosiologi menyebutkan bahwa nilai nilai atau keyakinan sebagai ideologi. Para sosiolog juga berpendapat bahwa dalam aspek kehidupan manusia tidak ada yang bersifat netral atau bebas nilai karena selalu didukung oleh nilai nilai dan keyakinan, baik sadar maupun bawah sadar.

Ideologi merupakan himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya, dan yang menentukan kebijakan politik selanjutnya.

Dalam persepektif kesejahteraan, posisi politik utama, atau ideologi yang berkembang antara lain: Marxisme, Sosialisme, Demokrasi Sosial, Konservatisme, Individualisme Liberal, dan Fasisme.

## **Marxisme.**

Adalah paham yang mengikuti pandangan Karl Heinrich Mark atau Karl Mark. Karl Mark Menyusun sebuah teori besar yang terkait dengan system ekonomi, system social, dan system politik. Kaum penganut ajaran Mark atau biasa disebut Marxis melihat masyarakat dari perpektif konflik antar kelas ekonomi. Sebuah kelas dominan (kaum borjuis atau kelas kapitalis) yang memiliki dan mengendalikan alat produksi dari sebuah kelas pekerja industry, (proletar)

Marxisme merupakan sebuah pendekatan untuk sosialisme dan komunisme sebagai dasar ideologi untuk model struktural kesejahteraan. Marx memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kekuasaan dan penghargaannya terhadap kebutuhan mereka.

Komunisme/marxisme menolak untuk menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kesejahteraan yang merupakan salah satu ideology kelas menengah mereka.

Ciri ciri Marxisme antara lain:

- a. Teori marxis mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di dunia. Norma norma yang mengatur secara ketat dan sulit untuk diubah tentang bagaimana manusia hidup.
- b. Memiliki dorongan besar dalam perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis.

## **Sosialisme**

Istilah sosialisme umumnya dipakai untuk merujuk pada dua hal: pertama, suatu ideologi dari sekumpulan ide atau keyakinan yang komprehensif mengenai kondisi masyarakat dan bagaimana situasinya dimasa depan, kedua, suatu keadaan yang mana masyarakat berperilaku berdasarkan ideologi.

Sosialisme adalah kolektivitas yang mana orang-orang harus dipahami dalam konteks sosial, bukan sebagai individu. Sosialisme sering direpresentasikan di Eropa dalam bentuk 'solidaritas' yang berarti bukan hanya berdiri sendiri, tetapi merupakan penciptaan sistem yang saling membantu.

Dalam konteks kesejahteraan menurut sosialisme adalah egaliter, artinya bahwa sosialis berkomitmen melakukan pengurangan atau penghapusan kerugian yang timbul di masyarakat. Tradisi Fabian sebuah Gerakan Reformis yang berusaha untuk menjadikan kesetaraan yang lebih besar melalui pendanaan untuk pelayanan sosial

Ciri-ciri sosialisme antara lain:

1. Menciptakan masyarakat sosialis
2. Memproses masyarakat sosialis tanpa kekerasan dan revolusi
3. Menyelesaikan masalah secara demokratis

## **Demokrasi Sosial**

Ideologi demokrasi social merupakan ideologi yang menganut nilai nilai kebebasan, kesetaraan dan solidaritas

Demokrasi social dan sosialisme memiliki perbedaan yang bias atau dapat dikatakan kalau keduanya sulit untuk dibedakan .

Demokrasi sosial seperti halnya sosialisme pada nilai nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Hal ini bergubungan dengan model demokrasi liberal yang didasarkan pada hak.

Paham demokrasi social memahami intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sector sektor kemasyarakatan yang mutlak diperlukan.

Ciri-ciri Demokrasi Sosial antara lain:

1. Keterlibatan negara yang cukup besar pada bidang ekonomi dan social
2. Dominasi negara pada masyarakat madani
3. Kolektivisme
4. Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme
5. Peran pasar yang dibatasi system ekonomi social atau campuran
6. Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal
7. Egalitarisme yang kuat. Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi negara 'sejak lahir sampai mati'
8. Modernisasi linie

## **Konservatisme**

Merupakan suatu filsafat politik yang mendukung nilai tradisional, yang berarti melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Pendukung konservatisme berusaha mempertahankan status quo.

Samuel Francis mendefinisikan konservatisme secara khusus sebagai 'pertahanan dan pengutamaan pihak-pihak tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaan yang dilembagakan'.

Ciri-ciri konservatisme antara lain:

1. Lebih mementingkan Lembaga tertentu, seperti kerajaan atau gereja
2. Agama dipandang sebagai kekuatan utama, selain tradisi dan kebiasaan dalam tata kehidupan masyarakat
3. Lembaga-Lembaga yang sudah mapan, seperti keluarga, gereja, dan negara dianggap suci
4. Konservatisme juga menentang radikalisme dan skeptisisme.

## **Individual Liberal**

Liberalisme dimulai dari premis bahwa setiap orang adalah individu yang memiliki hak. Dalam kancah politik, liberalism dianggap penting sebagai alat melakukan pembelaan terhadap masyarakat dari upaya penyalahgunaan oleh otoritas.

Nilai utama dari liberalism adalah kebebasan. Nilai-nilai liberal fokus pada tingkat kebebasan tertentu, seperti kebebasan berkumpul, berbicara, dan beribadah.

Karakteristik ideologi individual liberal antara lain:

1. Adanya jaminan terhadap hak milik perorangan
2. Sikap mementingkan diri sendiri dari individu yang bersangkutan
3. Adanya kebebasan penuh pada masing-masing individu
4. Adanya persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing

### **Fasisme**

Fasisme sering kali direpresentasikan dalam literatur akademik sebagai pseudo ideology yang tidak memiliki koherensi atau sistem pemikiran.

Ideologi fasisme berbasis kolektivisme otoriter, berarti kolektivitas (negara, bangsa atau ras) adalah yang terpenting. Fasisme ditandai dengan agenda sosial yang kuat. Dalam gerakan NAZI Jerman misalnya, mendorong supremasi ras termasuk intervensi negara dalam masyarakat dan sistem perekonomian.

Ciri-ciri Fasisme antara lain:

1. Kuat dan melanjutkan semangat nasionalisme, rezim fasis cenderung memanfaatkan semboyan, slogan, simbol, lagu sebagai sarana patriotik
2. Kebencian terhadap pelanggaran hak asasi manusia
3. Identifikasi terhadap pihak yang dianggap musuh adalah penyebab kekacauan
4. Supremasi militer muncul;
5. Seksisme merajala - pemerintahan fasisme didominasi laki-laki
6. Media massa yang terkendali



7. Faktor utama adalah keamanan nasional
8. Hubungan antara agama dan pemerintah. Agama cenderung dipakai alat utk manipulasi opini public

### **Implementasi ideologi kesejahteraan**

Dalam berbagai layanan kesejahteraan, pemerintah berusaha untuk memberikan dukungan bagi warganya melalui regulasi kesejahteraan social, jaminan social, atau bantuan keuangan.

Kesejahteraan merupakan kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia, karena terkait dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Dalam kesejahteraan juga dituntut untuk distribusi yang adil (tidak adanya kesenjangan) yang merupakan prinsip moral dalam masyarakat. Penghargaan (reward) diberikan sesuai kontribusi masyarakat dalam mendorong kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan berarti penyediaan layanan kesejahteraan dan dukungan social bagi seluruh rakyat pada tingkat minimal. Hal ini sering disebut sebagai bantuan public. Untuk beberapa negara maju, sebagian besar layanan kesejahteraan disediakan oleh pemerintah, selain untuk amal, kelompok sosial formal, kelompok keagamaan, dan organisasi antar pemerintah.

Indikator atau aspek kesejahteraan dari beberapa sumber bisa dipetakan secara sederhana sebagai berikut:

a. Nasikun (1993). Indikator kesejahteraan dapat dinilai dari:

- Rasa aman (security)
- Kesejahteraan (welfare)
- Kekebasan (freedom)
- Identitas (identity)

b. Kalle (dalam Bintaro 1998). Indikator kesejahteraan dapat dinilai dari:

- Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, pangan dst
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, Kesehatan tubuh, lingkungan lama dan sebagainya,
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, dan budaya
- Melihat dari segi spiritul seperti moral, etika, keserasian, penyesuain dll.

## Latihan

1. Apa arti ideologi?
2. Jelaskan ideologi kesejahteraan dari marxisme dan ciri cirinya?
3. Jelaskan arti dan ciri ciri konservatisme?
4. Jelaskan ciri ciri dari ideologi kesejahteraan demokrasi social?
5. Jelaskan implementasi ideologi kesejahteraan?

## Kunci Jawaban

1. Ideologi didefinisikan sebagai sebuah aturan yang terkait erat dengan ide dan keyakinan terhadap dunia dari sekelompok orang dengan menunjukkan bahasa atau perilaku kesejumlah orang atau masyarakat.
2. Marxisme adalah paham yang mengikuti pandangan Karl Heinrich Mark atau Karl Mark. Karl Mark Menyusun sebuah teori besar yang terkait dengan system ekonomi, system social, dan system politik. Kaum penganut ajaran Mark atau biasa disebut Marxis melihat masyarakat dari perpektif konflik antar kelas ekonomi. Sebuah kelas dominan (kaum borjuis atau kelas kapitalis) yang memiliki dan mengendalikan alat produksi dari sebuah kelas pekerja industry, (proletar) Marxisme merupakan sebuah pendekatan untuk sosialisme dan komunisme sebagai dasar ideologi untuk model struktural kesejahteraan. Marx memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kekuasaan dan penghargaannya terhadap kebutuhan mereka.

Ciri ciri Marxisme. Ciri ciri Marxisme antara lain:

- Teori marxis mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di dunia. Norma norma yang mengatur secara ketat dan sulit untuk diubah tentang bagaimana manusia hidup.
  - Memiliki dorongan besar dalam perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis.
3. Konservatisme adalah suatu filsafat politik yang mendukung nilai tradisional, yang berarti melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Pendukung konservatisme berusaha mempertahankan status quo.

Ciri ciri konservatisme antara lain:

- Lebih mementingkan Lembaga tertentu, seperti kerajaan atau gereja
  - Agama dipandang sebagai kekuatan utama, selain tradisi dan kebiasaan dalam tata kehidupan masyarakat
  - Lembaga Lembaga yang sudah mapan , seperti keluarga, gereja, dan negara dianggap suci
  - Konservatisme juga menentang radikalisme dan skeptisime.
4. Ciri ciri demokrasi social antara lain:
- Keterlibatan negara yang cukup besar pada bidang ekonomi dan social
  - Dominasi negara pada masyarakat mnadani
  - Kolektivisme
  - Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme• Peran pasar yang dibatasi system ekonomi social atayu campuran
  - Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal

- Egalitarisme yang kuat. Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi negara ‘sejak lahir sampai mati’
  - Modernisasi linier
5. Kesejahteraan menuntut untuk distribusi yang adil (tidak adanya kesenjangan) yang merupakan prinsip moral dalam masyarakat. Penghargaan (reward) diberikan sesuai kontribusi masyarakat dalam mendorong kesejahteraan bersama. Implementasi kesejahteraan berarti penyediaan layanan kesejahteraan dan dukungan social bagi seluruh rakyat pada tingkat minimal. Hal ini sering disebut sebagai bantuan public. Untuk beberapa negara maju, sebagian besar layanan kesejahteraan disediakan oleh pemerintah, selain untuk amal, kelompok sosial formal, kelompok keagamaan, dan organisasi antar pemerintah.

#### Daftar Pustaka

1. Strategi Manajemen Sektor Publik, Indra Bastian, Penerbit Salemba Empat, 2016
2. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, Aime Heene, Sebastian Desmit, 2010